

**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN GAMPONG
BERPRESTASI TAHUN 2021 BERDASARKAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL RI NO 6 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

KHAIRUL QAMAR

NIM. 170503135

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Ilmu Perpustakaan



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan**

Diajukan Oleh:

**KHAIRUL QAMAR
NIM. 170503135**

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Srata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Mukhtaruddin, M.LIS
NIP. 197711152009121001**

**Drs. Saifuddin A. Rasvid, M.LIS
NIP. 19690306007011002**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan**

Pada Hari/Tanggal :

**Selasa, 26 Juli 2023 M
08 Muharram 1445 H**

Darussalam - Banda Aceh

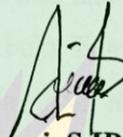
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



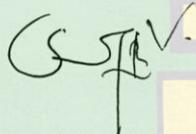
**Mukhtaruddin, M.LIS
NIP. 197711152009121001**

Sekretaris,



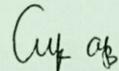
**Asnawi, S.IP., M.IP
NIP. 198811222020121010**

Penguji I,



**Suraiya, S.Ag., M.Pd
NIP. 197511022003122002**

Penguji II,



**Cut Putroe Yuliana, M.IP
NIP. 198507072019032017**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh**



**Syarifuddin, M.Ag., Ph.D
NIP. 197001011997031005**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khairul Qamar
NIM : 170503135
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Ilmu Perpustakaan

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Juli 2023



جامعة الرانيري
KHAIRUL QAMAR
NIM. 170503135
A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesainya penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengelolaan Perpustakaan Gampong Berprestasi Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang istimewa kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah banyak memberikan masukan, dorongan, semangat, dan pengorbanan serta doa-doa dan kasih sayangnya yang tak ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Syarifuddin, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Mukhtaruddin, M.LIS. dan Bapak T. Mulkan Safri, M.IP selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Mukhtaruddin, M.LIS sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan banyak membantu dan memberikan arahan dan masukan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Drs. Saifuddin A. Rasyid, M.LIS sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada pengelola Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar selaku informan dalam penelitian ini.
8. Terima kasih juga kepada sahabat serta seluruh kawan seperjuangan di Ilmu Perpustakaan khususnya angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 26 Juli 2023

A R - R A N I R Y Penulis,

KHAIRUL QAMAR
NIM. 170503135

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Perpustakaan Desa.....	14
1. Pengertian Perpustakaan Desa.....	14
2. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan Desa.....	15
3. Pengelolaan Perpustakaan Desa	19
C. Standar Pengelolaan Perpustakaan Desa Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Rancangan Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	28
G. Kredibilitas Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	33

BAB V	PENUTUP	46
	A. Kesimpulan.....	46
	B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN - LAMPIRAN		



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pengelolaan Perpustakaan Gampong Berprestasi Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan Perpustakaan Lambirah Aceh Besar dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Gampong Lambirah Kabupaten Aceh Besar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Tahapan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menerangkan bahwa pengelolaan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar yang telah sesuai dengan standar meliputi perencanaan, pengawasan, dan pelaporan perpustakaan sedangkan pengelolaan yang tidak sesuai dengan standar yaitu pelaksanaan perpustakaan yang tidak memiliki prosedur yang baku dan penganggaran perpustakaan yang tidak rutin menerima anggaran desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Perpustakaan Desa, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan desa merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.¹ Perpustakaan desa menjadi wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya ialah pengelolaan perpustakaan desa yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.² Khusus pada kajian ini penulis mengkategorikan fokus kajian pada aspek pengelolaan perpustakaan gampong berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa.

Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa pengelolaan perpustakaan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan penganggaran. Aspek perencanaan mencakup (1) Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta

¹ Lembar Lampiran Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.

² Subarini, *Transpormasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*, (Jakarta: PeNA, 2014), 8.

dilakukan secara berkesinambungan dan (2) Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan. Aspek pelaksanaan mencakup (1) Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel dan (2) Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku. Aspek Pengawasan mencakup (1) Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan dan (2) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan. Aspek pelaporan mencakup (1) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah desa dan 2) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja. Sedangkan aspek penganggaran penyelenggaraan perpustakaan mencakup (1) Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan, (2) Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan dan tenaga perpustakaan, (3) anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat, dan (4) Kepala Perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.³

Ditetapkannya standar pengelolaan pustaka desa tersebut guna perpustakaan desa mampu meraih prestasi yang baik dalam kinerjanya. Prestasi diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang

³ Lembar Lampiran Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.

dusahakan oleh seseorang dan sebuah lembaga, termasuk prestasi lembaga perpustakaan desa yang diberikan oleh pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga di tingkat nasional.

Upaya meningkatkan prestasi perpustakaan desa juga dilakukan oleh pemerintah Aceh. Di antara sekian banyak perpustakaan gampong yang terdapat di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2021 sudah memiliki sebuah perpustakaan berprestasi yakni Perpustakaan Gampong Lambirah terpilih sebagai perpustakaan yang memiliki prestasi nomor satu di seluruh Aceh. Atas prestasi ini Perpustakaan Gampong Lambirah memperoleh penghargaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh, bahkan perpustakaan Gampong Lambirah akan menjadi perwakilan Aceh di tingkat Nasional dalam ajang lomba perpustakaan gampong.

Perpustakaan Gampong Lambirah saat ini telah mengelola berbagai koleksi mulai dari buku referensi umum, buku agama, filsafat, sains, teknologi dan ilmu terapan, ilmu sosial, Bahasa, kesenian dan olahraga, sejarah dan geografi yang secara keseluruhan mencapai 2.304 judul dan 3.950 exemplar. Perpustakaan Gampong Lambirah juga memiliki koleksi dalam bentuk e-book, audio visual dan beberapa permainan alat peraga dengan jumlah mencapai 180.

Menurut pengamatan yang dilakukan, perpustakaan Gampong Lambirah dikelola oleh 6 orang yang terdiri dari 1 orang ahli bidang perpustakaan dan 5 orang bukan Sarjana Ilmu Perpustakaan. Perpustakaan Gampong Lambirah ini menyediakan berbagai jenis layanan seperti layanan sirkulasi, layanan baca di

tempat, layanan story telling, layanan koleksi anak, layanan audio visual, penelusuran informasi, layanan ekstensi dan layanan print dan photo copy gratis.

Sementara itu, pengamatan terkait dengan pengelolaan perpustakaan Gampong Lambirah terlihat belum ideal. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan perpustakaan Gampong Lambirah belum terorganisir dengan baik dalam hal jam operasional perpustakaan yang belum jelas dan tenaga pengelola perpustakaan yang masih kurang. Namun, dalam hal lainnya perpustakaan Gampong Lambirah dapat dikatakan baik seperti tersedianya koleksi yang beragam, fasilitas yang memadai, dan memiliki beragam program untuk peningkatan literasi masyarakat setempat.

Terpilihnya Perpustakaan Gampong Lambirah sebagai perpustakaan terbaik di lingkungan Provinsi Aceh, tentu adanya kualitas dari perpustakaan tersebut termasuk dalam aspek pengelolaan. Namun, karena tidak ada evaluasi yang dilakukan maka belum diketahui apakah pengelolaan perpustakaan tersebut sudah sesuai dengan standar pengelolaan yang terdapat dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal itu, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Perpustakaan Gampong Berprestasi Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan perpustakaan Lambirah Aceh Besar sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam kajian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan Perpustakaan Lambirah Aceh Besar dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu karya ilmiah serta menjadi sumber untuk dipelajari mengenai pengelolaan perpustakaan gampong berprestasi di Gampong Lambirah Aceh Besar berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti lainnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian ini.

- b. Bagi pengelola perpustakaan gampong, kajian ini menjadi bahan masukan untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam mengelola perpustakaan berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa.
- c. Bagi masyarakat, agar terus memanfaatkan perpustakaan gampong yang ada di Aceh Besar.
- d. Bagi pemerintah agar terus memberikan dukungan terhadap pengembangan perpustakaan gampong terutama Gampong Lambirah Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca lebih mudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan terkait istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan.⁴

Pengelolaan ialah suatu proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan,

⁴ Poewadarminta, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 348.

pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan.⁵ Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau disebut juga manajemen adalah proses menggerakkan tenaga orang lain untuk membantu ketika melakukan sesuatu sehingga lebih tepat serta efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Perpustakaan Gampong Berprestasi

Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, bahwa Perpustakaan desa merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.⁷

Purwanto menjelaskan bahwa perpustakaan desa merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang berada didesa, dikembangkan oleh masyarakat desa, serta memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi bagi

⁵ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka, 2015), 21.

⁶ Pascallino Julian Suawa, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)", *Jurnal Governance* Vol. 1 No. 2, (2021), 3.

⁷ Lembar Lampiran Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.

masyarakat desa.⁸ Selanjutnya, Sutarno NS juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perpustakaan desa adalah lembaga layanan publik yang berada di desa. Sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat tersebut dengan tujuan untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat.⁹

Adapun perpustakaan gampong yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah perpustakaan Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya, pengelolaan perpustakaan gampong berprestasi yang peneliti maksud dalam penelitian ini ialah cara yang dilakukan oleh pengelola dalam mengembangkan perpustakaan Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017

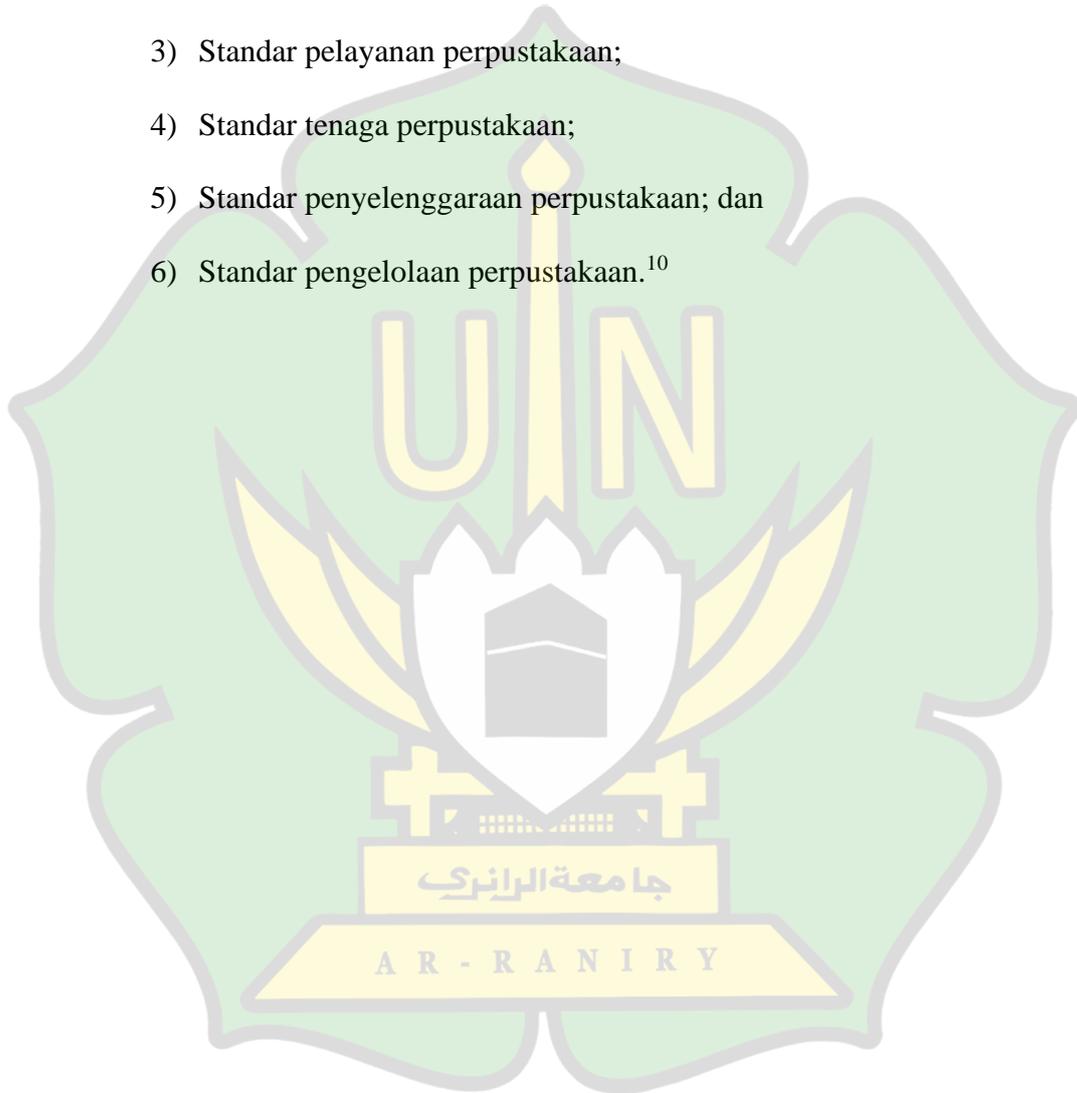
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan yaitu Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

⁸ Purwanto, *Manajemen Perpustakaan Desa*, (Lampung: Yayasan Petualang Literasi, 2020), 4.

⁹ Sutarno NS. *Membina Perpustakaan Desa*. (Jakarta: Sagung Seto, 2008), 33.

Setiap penyelenggara perpustakaan Desa/Kelurahan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Desa/ yang meliputi:

- 1) Standar koleksi perpustakaan;
- 2) Standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- 3) Standar pelayanan perpustakaan;
- 4) Standar tenaga perpustakaan;
- 5) Standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
- 6) Standar pengelolaan perpustakaan.¹⁰



¹⁰ Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan Pasal 2.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan berbagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya dengan menggali beberapa sumber informasi dari literatur-literatur untuk melakukan perbandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian serupa mengenai topik pengelolaan perpustakaan desa.

Penelitian pertama dilakukan oleh Johan Bhimo Sukoco pada tahun 2018 dengan judul “*Administrasi Pengelolaan Perpustakaan di Desa Puro Kabupaten Sragen*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengelolaan perpustakaan di Desa Puro Kabupaten Sragen. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Desa Puro masih menemui permasalahan secara administratif dalam pengelolaan perpustakaan. Hal ini diketahui dari ketersediaan koleksi di Perpustakaan Desa Puro yang sangat minim, yaitu hanya sebanyak 1.111 judul buku yang terdiri dari 2.126 eklempar. Kondisi ini mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung pada Bulan Februari 2014 sebanyak 926 pengunjung yang menurun drastis pada Bulan Mei 2014 hingga hanya di angka 408 pengunjung

dimana penurunan yang terjadi lebih dari 50% dengan rentang waktu dalam dua bulan.¹¹

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Amar Awalludin pada tahun 2019 dengan judul “*Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa Ujungnegoro Kabupaten Batang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan pengelolaan Perpustakaan Desa Ujungnegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis studi kasus. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan Perpustakaan Desa Ujungnegoro meliputi: (1) kegiatan pengadaan bahan pustaka dilakukan secara rutin yaitu setiap pertengahan dan akhir tahun oleh PT BPI dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Batang, (2) kegiatan pengolahan bahan pustaka belum dilakukan karena minimnya pengetahuan dan kurang aktifnya pengurus yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan pengolahan bahan pustaka, (3) kegiatan pelayanan pengguna belum dilakukan secara rutin, hal ini terkendala dengan kesibukan masing-masing pengurus Perpustakaan Desa Ujungnegoro, (4) kegiatan pemeliharaan bahan pustaka masih dilakukan secara tradisional, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan tidak aktifnya pengurus yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan pemeliharaan bahan pustaka, dan (5) kegiatan

¹¹ Johan Bhimo Sukoco, “Administrasi Pengelolaan Perpustakaan di Desa Puro Kabupaten Sragen”. *Journal of Public Administration and Local Governance* Vol. 2, No. 2 (2018), 5.

kerjasama Perpustakaan Desa Ujungnegoro sudah dilakukan dengan berbagai pihak organisasi dan masyarakat Desa Ujungnegoro.¹²

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aurel Aulia Kurniawan pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru beserta pola kemitraan atau hubungan kerjasamanya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan penganggaran penyelenggaraan Perpustakaan masih belum terlaksana dengan optimal, serta pola kemitraan atau hubungan kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru dengan perpustakaan Desa/Kelurahan telah terjalin dengan baik.¹³

Berdasarkan perbandingan penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Johan Bhimo Sukoco terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif lapangan sedangkan

¹² Amar Awalludin, “*Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa Ujungnegoro Kabupaten Batang*”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan* Vol 6, No 3 (2019), 1.

¹³ Aurel Aulia Kurniawan, *Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2022), xiv.

penelitian yang dilakukan oleh Johan Bhimo Sukoco menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitian dilakukan serta sampel yang digunakan. Adapun persamaan yang terdapat antara dua penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan penggunaan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta sama-sama dengan menggunakan teknik *purposive* dalam penentuan sampel penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Amar Awalludin juga memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya adalah terletak pada lokasi dan waktu penelitian dilakukan serta sampel yang digunakan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aurel Aulia Kurniawan memiliki persamaan pada metode penelitian kualitatif serta pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan juga terletak pada lokasi dan waktu penelitian dilakukan serta sampel yang digunakan.

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian di atas terdapat keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, namun juga memiliki perbedaan pada judul yang digunakan serta tempat dan waktu dilakukannya penelitian.

B. Perpustakaan Desa

1. Pengertian Perpustakaan Desa

Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan menerangkan bahwa perpustakaan desa/kelurahan merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.¹⁴

Purwanto menjelaskan bahwa perpustakaan desa merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang berada didesa, dikembangkan oleh masyarakat desa, serta memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat desa.¹⁵ Selanjutnya, Khilda Nur Lutfiyana juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perpustakaan desa adalah perpustakaan yang dikembangkan dan didirikan atas inisitif dan prakarsa dari pemerintah desa, penyelenggaraannya juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa, yang digunakan masyarakat sebagai media untuk mendukung pendidikan informal di lingkungan masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berpendidikan dan berwawasan luas.¹⁶

¹⁴ Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan Pasal 2.

¹⁵ Purwanto, *Manajemen Perpustakaan Desa*, (Lampung: Yayasan Petualang Literasi, 2020), 4.

¹⁶ Khilda Nur Lutfiyana, dkk., "Pendampingan Otomasi Pengelolaan Perpustakaan Desa Pancur Berbasis SLiMS 9 Bulian", *Abdimas* Vol. 26, No. 2, (2022), 122-123.

Berdasarkan pengertian tentang perpustakaan desa yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan desa merupakan lembaga pelayanan kepada masyarakat desa setempat yang berisi koleksi buku atau non buku guna memberikan layanan untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat, serta mendukung kegiatan pendidikan dan rekreasi untuk masyarakat.

2. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan Desa

a. Tujuan Perpustakaan Desa

Pada dasarnya perpustakaan desa didirikan untuk tujuan memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan, bagi masyarakat desa sekaligus menjadi sarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran atau pendidikan siswa sekolah dalam lingkup desa bahkan diharapkan dapat menjadi alternatif belajar nonformal bagi masyarakat di suatu desa agar senantiasa memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan.¹⁷

Secara umum tujuan penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menunjang program wajib belajar
- 2) Menunjang program kegiatan pendidikan seumur hidup bagi masyarakat.
- 3) Menyediakan buku-buku pengetahuan. maupun keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan masyarakat diberbagai bidang

¹⁷ Purwanto, *Manajemen Perpustakaan Desa*, (Lampung: Yayasan Petualang Literasi, 2020), 21-22.

misalnya: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perindustrian, Pengolahan, Pemasaran dan lain-lain.

- 4) Menggalakkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu luang untuk membaca agar tercipta masyarakat kreatif, dinamis, produktif dan mandiri.
- 5) Menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudayaan sebagai sumber informasi, penerangan, pembangunan dan menamba wawasan pengetahuan masyarakat pedesaan.
- 6) Memberikan semangat dan hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu senggang dalam hal- hal yang bersifat membangun.
- 7) Mendidik masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil guna.¹⁸

Selanjutnya, Pawit M Yusuf menjelaskan tujuan diadakannya perpustakaan desa atau kelurahan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat desa atau kelurahan dan memberi daya kreasi, prakarsa, dan swadaya masyarakat desa guna meningkatkan penghidupan dan kesejahteraannya.
- 2) Menyediakan berbagai kebutuhannya untuk penerangan, informasi, dan data sekunder, serta pengetahuan ilmiah.

¹⁸ Rory Ramayanti, "Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa Pandan Baiduri" dalam Meningkatkan Literasi Informasi Masyarakat", *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* Vol. 27 No. 01, (2021), 23.

- 3) Membantu kegiatan dalam bidang pendidikan masyarakat dan kebudayaan dari individu-individu, golongan-golongan, dan organisasi-organisasi.
- 4) Memberi semangat dan hiburan yang sehat dalam hal-hal yang bersifat membangun dalam mengisi waktu senggangnya.
- 5) Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberi semangat membaca dan belajar masyarakat.
- 6) Membekali berbagai pengetahuan dan ilmu serta pengalaman kepada masyarakat di berbagai bidang.¹⁹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan diselenggarakannya Perpustakaan Desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa sehingga masyarakat desa dapat meningkatkan keterampilannya dan menaikkan taraf kehidupan dan kesejahteraannya sama seperti masyarakat di wilayah perkotaan.

b. Fungsi Perpustakaan Desa

Menurut Sutarno, perpustakaan desa berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.²⁰ Selanjutnya,

¹⁹ Pawit M. Yusuf, *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakawan*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2019), 185.

²⁰ Himma Ellhaya, "Menumbuhkan minat baca masyarakat Desa Tenggun Dajjah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura melalui Perpustakaan Desa", *Abdimas Siliwangi* Vol. 6 No. 1, (2023), 164.

menurut Pawit M. Yusuf dan Yaya Suhendar perpustakaan desa memiliki empat fungsi umum yaitu:

- 1) Fungsi edukatif, yaitu segala fasilitas dan sarana yang ada pada perpustakaan desa, terutama koleksi yang dikelolanya banyak membantu masyarakat desa untuk belajar atau menambah pengetahuan akan hal-hal yang berguna bagi kehidupannya.
- 2) Fungsi informatif, yaitu mengupayakan penyediaan koleksi perpustakaan yang bersifat “memberi tahu” akan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa.
- 3) Fungsi rekreasi, yaitu sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan sebagian anggota masyarakat akan hiburan intelektual.
- 4) Fungsi riset atau penelitian, yaitu koleksi perpustakaan desa bisa dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya kegiatan penelitian sederhana.²¹

Pendapat Wiji Suwarno mengatakan bahwa fungsi perpustakaan desa terbagi tiga diantaranya fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi kultural.

- 1) Fungsi Pendidikan, yaitu fungsi yang menunjang system pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah, dan sumber belajar bagi siswa disekolah.

²¹ Azaz Akbar, *Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Akreditasi*, (Baubau: Penerbit Leisyah, 2019), 16-18.

- 2) Fungsi Rekreasi, yaitu perpustakaan yang sifatnya menghibur, dalam artian lain dapat dikatakan sebagai tempat rekreasi sehat untuk membaca bagi siswa.
- 3) Fungsi Kultural, yaitu perpustakaan selain sebagai tempat pendidikan juga sebagai media dalam melestarikan kebudayaan bangsa.²²

Berdasarkan fungsi tentang perpustakaan desa yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan desa berfungsi sebagai sarana pendidikan dan penelitian serta sumber informasi intelektual yang dapat juga dijadikan sebagai tempat pelestarian budaya bangsa.

3. Pengelolaan Perpustakaan Desa

Pengelolaan perpustakaan menjadi hal yang amat penting jika perpustakaan diharapkan dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat. Darmono menjelaskan pengelolaan perpustakaan desa dapat dilakukan dengan melihat tiga aspek yaitu:

1) Tempat

Perpustakaan desa harus menentukan masalah akses yang strategis bagi masyarakat. Jauh dan susahnya mendapatkan bahan bacaan menjadi salah satu sebab jauhnya masyarakat desa pada buku. Terlebih jika perpustakaan berada di dekat balai desa yang posisi atau lokasinya

²² Annisa Dwi Lestari, dkk., "Perpustakaan digital sebagai alternatif utama dalam memberikan layanan pada masa pandemi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung", *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, Vol. 3 No. 1, (2021), 26.

terpencil atau terpisah dari pusat keramaian desa. Perpustakaan desa idealnya didirikan di rumah perangkat desa, atau lebih bagus lagi jika secara khusus membangun ruang untuk perpustakaan desa di “jantung kota” warga desa agar kehadirannya betul-betul diketahui.

2) Koleksi dan pengelola

Sesuai dengan namanya, perpustakaan, tentu isinya adalah bahan bacaan atau pustaka. Seandainya isinya hanya bacaan, baik koran, majalah, maupun buku, itu tak soal. Namun tingkat kebutuhan dan modus masyarakat mengonsumsi informasi sekarang ini tidak melulu mengandalkan buku, koran, dan majalah berbasis pohon (kertas), masyarakat saat ini juga mengonsumsi informasi dari internet dan televisi.

3) Kegiatan perpustakaan

Salah satu kendala besar mengajak masyarakat datang ke perpustakaan dan membaca buku karena mereka tidak menemukan keterkaitan yang erat antara bacaan dan aktivitas keseharian.²³

Amar Awalludin menjelaskan pengelolaan perpustakaan desa dapat berjalan dengan baik jika dilihat melalui kondisi internal maupun eksternal:

- 1) Kondisi internal, antara lain berkaitan dengan keterbatasan tenaga yang terampil, koleksi, sarana dan prasarana, dan anggaran.

²³ Darmono, "Manajemen Pelayanan Perpustakaan Desa", *Makalah Kegiatan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca – Bimtek Kader Pustaka se Kabupaten Malang*, (2019), 5-6.

- 2) Kondisi eksternal, antara lain rendahnya minat baca masyarakat, akses perpustakaan dan perhatian masyarakat yang relatif terbatas.²⁴

Purwanto juga menyebutkan bahwa pengelolaan perpustakaan Desa meliputi sebagai berikut:

- 1) Koleksi, yaitu bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat desa dan berhubungan dengan pengembangan masyarakat setempat.
- 2) Sarana dan prasarana, yaitu peralatan dan perlengkapan pokok dan penunjang agar perpustakaan desa dapat berjalan dengan baik.
- 3) Pelayanan, yaitu penyediaan segala bentuk bahan pustaka yang dibutuhkan masyarakat dan penyediaan berbagai sarana penelusuran informasi.
- 4) Tenaga perpustakaan, yaitu pustakawan yang mengelola perpustakaan desa.
- 5) Penyelenggaraan, yaitu melayani perpustakaan desa kepada masyarakat setempat, dan
- 6) Pengelolaan perpustakaan, yaitu kegiatan mengurus perpustakaan desa untuk dapat di selenggarakan kepada masyarakat dengan baik.²⁵

²⁴ Amar Awalludin & Sri Ati, "Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa Ujungnegoro Kabupaten Batang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* Vol. 6 No. 3, (2019), 2.

²⁵ *Manajemen Perpustakaan Desa*, (Lampung: Yayasan Petualang Literasi, 2020), 10.

Berdasarkan pemaparan yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perpustakaan desa dapat berjalan dengan baik jika dikelola secara terarah beragam aspek yang ada didalamnya.

C. Standar Pengelolaan Perpustakaan Desa Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017

Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.²⁶

Terkait pengelolaan perpustakaan pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 disebutkan pada lampiran poin 8 bahwa Pengelolaan Perpustakaan terdiri dari aspek sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, meliputi:
 - a) Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
 - b) Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan.
- 2) Pelaksanaan, meliputi:
 - a) Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.

²⁶ Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan Pasal 2.

- b) Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku.
- 3) Pengawasan, meliputi:
- a) Pengawasan perpustakaan melalui supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
 - b) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.
- 4) Pelaporan, meliputi:
- a) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah desa.
 - b) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:
- a) Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan. Kepala Perpustakaan Kepala Desa/Lurah Pelayanan Teknis Pelayanan Pemustaka
 - b) Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk tiga komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan.
 - c) Anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.

- d) Kepala Perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.²⁷



²⁷ Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan Pasal 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁸ Dengan demikian jenis penelitian lapangan akan menggambarkan pengelolaan perpustakaan Lambirah Aceh Besar sudah sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017.

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Gampong Lambirah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dilaksanakan pada bulan 22 Mei 2023 sampai dengan 26 Mei 2023.

²⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 2017), 58.

²⁹ Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaj Rosda Karya, 2018), 4.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan pada tujuan dari penelitian yang dilakukan.³⁰ Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.³¹

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pengelolaan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.³² Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan perpustakaan Lambirah Aceh Besar.

Selanjutnya, istilah “subjek penelitian” menunjukkan pada orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit satuan (khusus) yang diteliti.³³ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah subjek penelitian untuk menunjukkan sasaran penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kepala perpustakaan dan pengelola Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 32.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 15.

³² Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 78.

³³ Faisal dan Sanapiah, *Formal-formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: Ratu Grafindo Persada, 2008), 109.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.³⁴ Adapun yang diamati dalam penelitian ini berupa pengelolaan perpustakaan berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, penganggaran, dan tanggung jawab Kepala Perpustakaan Lambirah Aceh Besar.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁵ Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah melakukan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang dilaksanakan secara terencana dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti mewawancarai Kepala Perpustakaan dan seorang pengelola perpustakaan dengan latar belakang Pendidikan Ilmu

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*, 166.

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

Perpustakaan di Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar. Adapun wawancara dilakukan pada bulan Februari 2023 dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan yang menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Perpustakaan Gampong Berprestasi Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017 dengan menggunakan alat bantu perekam suara untuk merekam hasil jawaban dari pertanyaan yang telah dijawab.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁶ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data pengunjung dibagian sirkulasi, profil Perpustakaan, jumlah pengunjung dan foto-foto penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

³⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 158.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memper-pendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.³⁷

G. Kredibilitas Data

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.³⁸ Penelitian berangkat dari data dan data adalah hal yang sangat penting dalam penelitian.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, 62.

³⁸ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 165.

Oleh karena itu, data harus benar-benar valid, ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dengan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁹ Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.⁴⁰

Adapun kredibilitas data yang penulis lakukan dengan melakukan pengamatan secara berkelanjutan, dimana peneliti akan melakukan beberapa kali pengamatan terhadap kegiatan pengelolaan perpustakaan Lambirah Aceh Besar dengan cara melibatkan diri secara langsung dan berturut-turut selama penelitian dilakukan. Setelah menemukan data di lapangan, maka langkah berikutnya ialah memperkuat data tersebut yakni dengan membandingkan antara hasil temuan dengan berbagai kajian relevan guna memperkuat data yang diperoleh saat penelitian terkait pengelolaan perpustakaan Lambirah Aceh Besar.

Langkah selanjutnya peneliti melakukan triangulasi terhadap data yang ditemukan di lapangan dengan cara mengecek dan mengkritisi data guna mendapatkan data yang valid terkait pengelolaan perpustakaan Lambirah Aceh Besar sudah sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2017.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 14.

⁴⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar

Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar atau lebih dikenal dengan Taman Pendidikan Masyarakat Tanyoe (TPMT) berdiri sejak tanggal 7 Agustus 2011 atas ide Husnul Khatimah Adnan dan dibantu oleh *Lambiwood Community* yaitu komunitas remaja putra dan putri Gampong Lambirah. Gampong Lambirah yang jauh dari jangkauan khalayak ramai dan akses pendidikan yang sangat terbatas serta perilaku generasi muda yang mulai menyimpang menjadi inspirasi bagi Husnul untuk mendirikan Taman Pendidikan Masyarakat Tanyoe. Banyak anak-anak yang mulai kecanduan *game online* atau yang lebih dikenal dengan *Play Station* (PS). Mereka menjadi malas mengikuti pengajian dan belajar karena keasyikan bermain PS tersebut. Bahkan untuk bisa bermain PS mereka ada yang mencuri ayam tetangga untuk di jual kemudian uangnya digunakan untuk membayar PS. Demi mengalihkan perhatian anak-anak yang sudah mulai kecanduan PS, Husnul dan beberapa anggota dari *Lambiwood Community* mencoba membimbing mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu dengan membaca buku dan bermain sambil belajar.

Niat baik Husnul dan kawan-kawan *Lambiwood Community* sempat terjejal sifat pesimis saat hendak mendirikan TPMT dikarenakan kurangnya dukungan dari warga sekitar disebabkan dana yang kurang dan fasilitas yang

tidak memadai. Pantang menyerah, Husnul terus meyakinkan warga. Setelah berkali-kali mengadakan pertemuan akhirnya aparatur Gampong mengizinkan Husnul menggunakan salah satu gedung SD *pasca* tsunami yang sudah tidak terpakai lagi. Pada tanggal 7 Agustus 2011, dengan hasil jerih payah Husnul dan bantuan dari pemuda Gampong Lambirah serta dukungan dari berbagai pihak, berdirilah Taman Pendidikan Masyarakat Tanyoe. Nama “Tanyoe” yang berarti “kita” digunakan agar lebih akrab dengan masyarakat sekitar dengan motto “pendidikan dari kita, oleh kita dan untuk kita”.⁴¹

2. Visi dan Misi

a) Visi:

Menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat

b) Misi:

- 1) Meningkatkan minat baca masyarakat sekitar.
- 2) Membudayakan kegemaran membaca dan pemanfaatan perpustakaan dikalangan masyarakat.
- 3) Membuat kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴²

⁴¹ Data Perpustakaan Gampong Lambirah tahun 2023.

⁴² *Ibid.*

3. Struktur Organisasi



Sumber: Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa pengelolaan perpustakaan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan penganggaran.

a) Perencanaan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mencapainya. Hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh bahwa pengelola Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar telah melakukan perencanaan kerja bulanan dan juga bulanan sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari pengelola perpustakaan sebagai berikut:

*"Rencana kerja tahunan dan bulanan pasti ada karena kegiatan yang kami buat selalu rutin jadi harus ada rencana kerja yang jelas."*⁴³

Selain itu, Kepala Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar juga menambahkan:

*"Yang melakukan penyusunan perencanaan perpustakaan itu kepala perpustakaan dan pengelola perpustakaan serta perencanaan dibuat berdasarkan hasil survei kebutuhan masyarakat/pemustaka dan perencanaan selalu dilakukan secara kesinambungan."*⁴⁴

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar telah menetapkan penyusunan perencanaan yang jelas sesuai dengan instruksi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 dimana perencanaan yang dibuat secara berkesinambungan berdasarkan hasil survei kebutuhan masyarakat sekitar

⁴³ Wawancara bersama Pengelola Perpustakaan: Rijalul Akbar pada 24 Mei 2023.

⁴⁴ Wawancara bersama Kepala Perpustakaan: Novayaturrahmi, S.IP pada 23 Mei 2023.

sesuai dengan visi dan misi perpustakaan yaitu membuat kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Pelaksanaan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar

Pelaksanaan diperlukan untuk mewujudkan rencana atau program yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar telah melakukan pelaksanaan secara mandiri namun belum memiliki prosedur pelaksanaan perpustakaan secara tertulis seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

"Untuk pelaksanaan kegiatan tetap wewenangnya dari pengelola yang bertanggung jawab atas perpustakaan sendiri." ⁴⁵

Lalu pengelola perpustakaan juga menambahkan:

"Untuk prosedur tertulis belum ada tapi kegiatan inventarisasi, Pengatalogan, Penyelesaian fisik buku, dan Shelving tetap dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan." ⁴⁶

Berkaitan dengan wawancara di atas, diketahui bahwa Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar telah mandiri dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan tanpa adanya campur tangan pihak lain namun belum sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 yang telah ditetapkan yakni belum memiliki prosedur pelaksanaan kegiatan secara tertulis.

⁴⁵ Wawancara bersama Pengelola Perpustakaan: Rijalul Akbar pada 24 Mei 2023.

⁴⁶ Wawancara bersama Pengelola Perpustakaan: Rijalul Akbar pada 24 Mei 2023.

c) Pengawasan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar setelah dilakukan wawancara dengan Kepala Perpustakaan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*"Iya pengawasan dilakukan secara berkesinambungan dan teratur agar kalau ada kendala dapat segera ditangani dan tidak sampai menjadi masalah yang serius."*⁴⁷

Lalu menambahkan:

*"Yang melakukan pengawasan biasanya Kepala Desa, Pembina/penasehat desa."*⁴⁸

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar telah dilakukan secara berkesinambungan dengan supervisi dari Kepala Desa atau Pembina/Penasehat Desa dan telah sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017.

d) Pelaporan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar

Pelaporan diperlukan untuk menyampaikan perkembangan atau hasil dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil wawancara yang dilakukan terkait pelaporan yang dilakukan oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar diketahui data sebagai berikut:

*"Telah melakukan pelaporan namun sesuai dengan apa kebutuhannya kalau perlu dilaporkan ya akan dilaporkan."*⁴⁹

⁴⁷ Wawancara bersama Kepala Perpustakaan: Novayaturrahmi, S.IP pada 23 Mei 2023.

⁴⁸ Wawancara bersama Kepala Perpustakaan: Novayaturrahmi, S.IP pada 23 Mei 2023.

⁴⁹ Wawancara bersama Pengelola Perpustakaan: Rijalul Akbar pada 24 Mei 2023.

Adapun bentuk pelaporan yang digunakan oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar seperti yang dikatakan oleh Kepala Perpustakaan yakni:

*"Bentuknya pelaporan tertulis Laporan pertanggung jawaban atau disebut LPJ meliputi penggunaan anggaran, Laporan kegiatan dan progres kerja perpustakaan."*⁵⁰

Lalu Kepala Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar menambahkan:

*"Yang melakukan pelaporan itu Kepala Perpustakaan dan dibantu sama Bendahara."*⁵¹

Selain itu, pengelola perpustakaan juga mengatakan kesesuaian pelaporan yang mereka lakukan dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 sebagai berikut:

*"Pelaporan telah dilakukan secara berkala biar tau perpustakaan punya kendala apa dan bisa berbenah mengembangkan layanannya."*⁵²

*"Pelaporan memang dibuat namun tidak dibuat secara rinci /detail seperti yang ada pada peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 tahun 2017 tentang standar perpustakaan Desa/Kelurahan."*⁵³

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar telah melakukan pelaporan yang jelas yang dilakukan oleh Kepala Perpustakaan dan Bendahara secara berkala melalui laporan pertanggung jawaban tertulis meliputi laporan penggunaan anggaran, laporan kegiatan dan laporan progres kerja perpustakaan. Adapun Pelaporan yang dilakukan oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar telah

⁵⁰ Wawancara bersama Kepala Perpustakaan: Novayaturrahmi, S.IP pada 23 Mei 2023.

⁵¹ Wawancara bersama Kepala Perpustakaan: Novayaturrahmi, S.IP pada 23 Mei 2023.

⁵² Wawancara bersama Pengelola Perpustakaan: Rijalul Akbar pada 24 Mei 2023.

⁵³ Wawancara bersama Pengelola Perpustakaan: Rijalul Akbar pada 24 Mei 2023.

sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 walaupun belum terlalu rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan.

e) Penganggaran Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar

Penganggaran merupakan proses penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan perencanaan kegiatan yang telah dibuat. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Perpustakaan terkait penganggaran yang dilakukan oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar adalah sebagai berikut:

"Untuk penganggaran selalu disusun secara kesinambungan karena merupakan kebutuhan untuk mengembangkan perpustakaan." ⁵⁴

"Penganggaran disusun sama Kepala perpustakaan dibantu oleh pengelola perpustakaan." ⁵⁵

Kepala Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar juga menambahkan terkait pengusulan dan pemanfaatan anggaran yaitu:

"Perpustakaan selalu melakukan pengusulan anggaran untuk perpustakaan tapi yang cair anggarannya terakhir di tahun 2021." ⁵⁶

"Anggaran selalu kita maksimalkan di tiga poin itu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan karena itu yang paling utamanya agar perpustakaan terus bisa dilayankan kepada pemustaka." ⁵⁷

Selain itu, Kepala Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar juga menjelaskan sumber pemasukan anggaran untuk perpustakaan yakni:

"Perpustakaan tidak rutin menerima anggaran dari desa, kadang ada anggaran dari desa atau dari kegiatan yang kami lakukan misalnya dari

⁵⁴ Wawancara bersama Pengelola Perpustakaan: Rijalul Akbar pada 24 Mei 2023.

⁵⁵ Wawancara bersama Pengelola Perpustakaan: Rijalul Akbar pada 24 Mei 2023.

⁵⁶ Wawancara bersama Pengelola Perpustakaan: Rijalul Akbar pada 24 Mei 2023.

⁵⁷ Wawancara bersama Pengelola Perpustakaan: Rijalul Akbar pada 24 Mei 2023.

*hasil sewa baju tari yang kami punya disitu juga masuk ke anggaran pengembangan untuk perpustakaan."*⁵⁸

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar telah melakukan penganggaran yang jelas yang dilakukan oleh Kepala Perpustakaan dan Pengelola Perpustakaan secara berkesinambungan meliputi penganggaran terhadap koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan namun masih terkendala dengan usulan penganggaran yang tidak ditanggapi oleh pemerintahan desa yang dapat dilihat melalui anggaran yang terakhir diterima oleh perpustakaan pada tahun 2021 sehingga dapat disimpulkan bahwa penganggaran Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar belum sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017.

Terdapat beberapa prestasi yang telah diraih oleh perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar yaitu sebagai berikut.⁵⁹

Tabel 4.2 Prestasi Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar

No.	Prestasi yang diraih	Tahun
1.	Juara I Perpustakaan gampong terbaik tingkat Kabupaten Aceh Besar	2014
2.	Juara II perpustakaan gampong terbaik tingkat Provinsi Aceh	2015
3.	Juara II perpustakaan gampong terbaik tingkat Kabupaten Aceh Besar	2016
4.	Juara I perpustakaan gampong terbaik tingkat kabupaten Aceh Besar	2017
5.	Juara III perpustakaan gampong terbaik tingkat Provinsi Aceh	2017
6.	Juara I perpustakaan gampong Terbaik se-Aceh Besar	2019
7.	Juara II perpustakaan Gampong terbaik tingkat	2020

⁵⁸ Wawancara bersama Kepala Perpustakaan: Novayaturrahmi, S.IP pada 23 Mei 2023.

⁵⁹ Data Perpustakaan Gampong Lambirah Tahun 2023.

	Provinsi Aceh	
8.	Perpustakaan Desa Terbaik dalam implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional	2020
9.	Cerita impact perpustakaan terbaik kategori tulisan tingkat 59 Nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional	2020
10.	Juara I Perpustakaan gampong terbaik tingkat Provinsi	2021
11.	Perpustakaan Desa terbaik dalam implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tingkat Provinsi	2021
12.	Perpustakaan Desa Terbaik dalam implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional	2021
13.	Juara harapan III Perpustakaan Desa/Kelurahan terbaik tingkat Nasional	2021

Beranjak dari hal tersebut, perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar berhasil meraih juara I lomba perpustakaan gampong tingkat Provinsi Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh melalui pengumuman lomba nomor : 041/117/Kept/2021 tanggal 28 Juli 2021.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Aceh Besar Juara I Lomba Perpustakaan Gampong Tingkat Provinsi

• Juli 30, 2021

■ 1 minute read



Banda Aceh – Aceh Besar berhasil meraih juara I lomba perpustakaan gampong tingkat Provinsi Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh.

Hal itu diketahui pada pengumuman lomba perpustakaan gampong terbaik se-Aceh Tahun 2021, nomor : 041/117/Kept/2021 tanggal 28 Juli 2021.

Gambar 4.1 Berita perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar berhasil meraih juara I lomba perpustakaan gampong tingkat Provinsi Tahun 2021.

Pengelolaan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar yang terpilih sebagai Perpustakaan Gampong Berprestasi Tahun 2021 secara garis besar telah sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

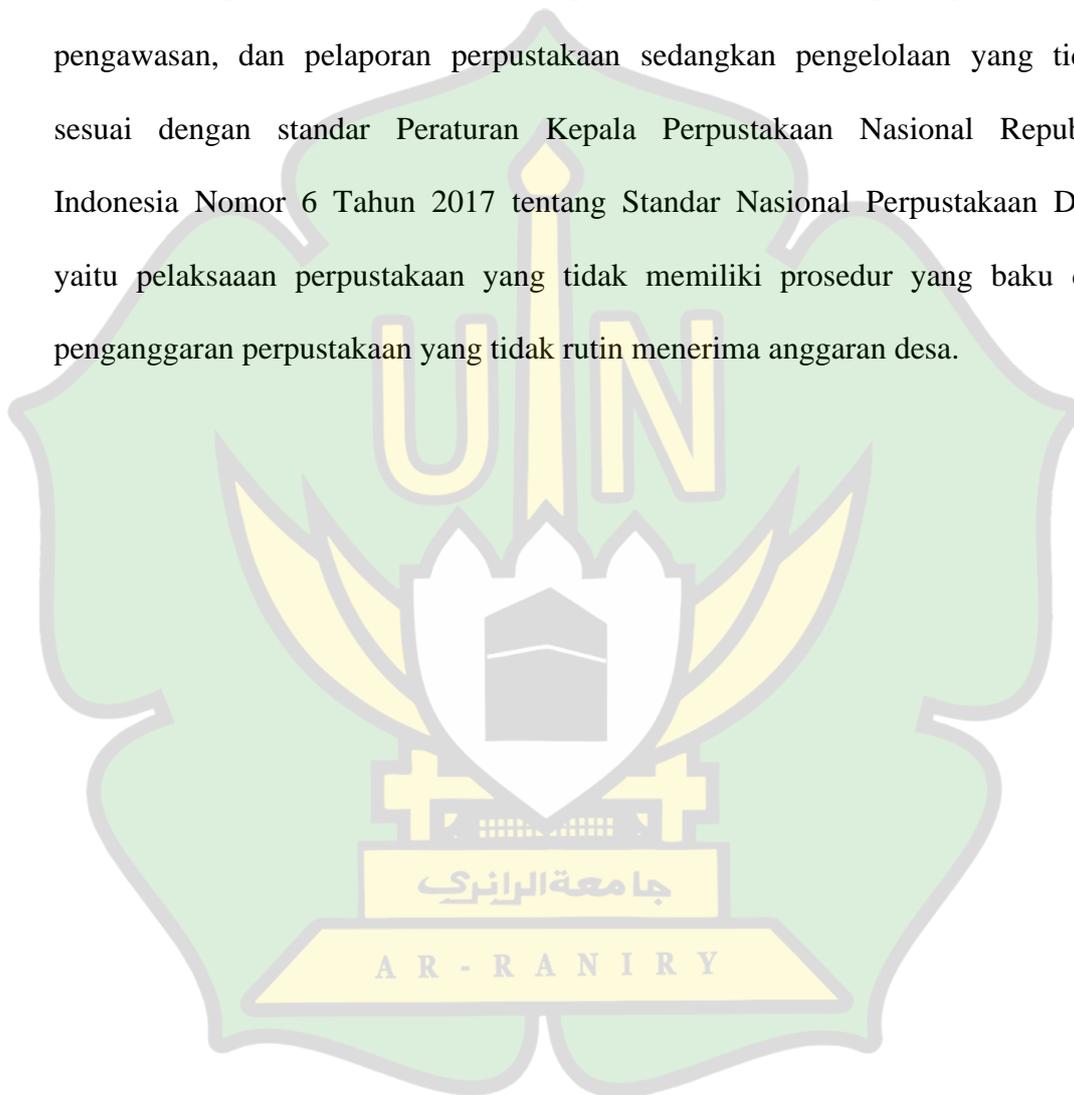
Tabel 4.1 Pengelolaan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar

NO.	BIDANG	ASPEK YANG DI LIHAT	STANDAR PENGELOLAAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan	1) Menyusun perencanaan tahunan dan program kerja bulanan 2) Perencanaan dibuat sesuai dengan kebutuhan pemustaka.	Menyusun perencanaan kerja tahunan dan program kerja bulanan	Sesuai
2.	Pelaksanaan	1) Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efektif dan efisien. 2) Pelaksanaan perpustakaan tidak memiliki prosedur yang baku.	1) Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efektif dan efisien. 2) Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku	Tidak Sesuai
3.	Pengawasan	1) Pengawasan perpustakaan melalui supervisi, evaluasi, dan pelaporan. 2) Supervisi dilakukan oleh Kepala Desa, Pembina atau penasehat desa secara teratur dan berkesinambungan.	3) Pengawasan perpustakaan melalui supervisi, evaluasi, dan pelaporan. 4) Supervisi dilakukan oleh Kepala Desa, Pembina atau penasehat desa secara teratur dan berkesinambungan.	Sesuai
4.	Pelaporan	1) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan	1) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan	Sesuai

		<p>kepada pemerintah desa.</p> <p>2) Memiliki laporan pertanggung jawaban yang meliputi penggunaan anggaran, laporan kegiatan dan progres kerja perpustakaan.</p> <p>3) Pelaporan dibuat secara berkala untuk kebutuhan pengembangan perpustakaan.</p> <p>4) Pelaporan sesuai dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 tahun 2017 tentang standar perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran.</p>	<p>kepada pemerintah desa.</p> <p>2) Memiliki laporan pertanggung jawaban yang meliputi penggunaan anggaran, laporan kegiatan dan progres kerja perpustakaan.</p> <p>3) Pelaporan dibuat secara berkala untuk kebutuhan pengembangan perpustakaan.</p> <p>4) Pelaporan sesuai dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 tahun 2017 tentang standar perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran.</p>	
5.	Penganggaran	<p>1) Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan.</p> <p>2) Pemanfaatan anggaran</p>	<p>1) Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan. Kepala Perpustakaan Kepala</p>	Tidak Sesuai

		<p>perpustakaan diperuntukan untuk tiga komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan.</p> <p>3) Perpustakaan tidak rutin menerima anggaran desa.</p> <p>4) Perpustakaan memperoleh anggaran dari sumber lain yang tidak mengikat.</p> <p>5) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.</p>	<p>Desa/Lurah Pelayanan Teknis Pelayanan Pemustaka.</p> <p>2) Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan untuk tiga komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan.</p> <p>3) Anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.</p> <p>4) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.</p>	
--	--	---	---	--

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar yang telah sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa meliputi perencanaan, pengawasan, dan pelaporan perpustakaan sedangkan pengelolaan yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa yaitu pelaksanaan perpustakaan yang tidak memiliki prosedur yang baku dan penganggaran perpustakaan yang tidak rutin menerima anggaran desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

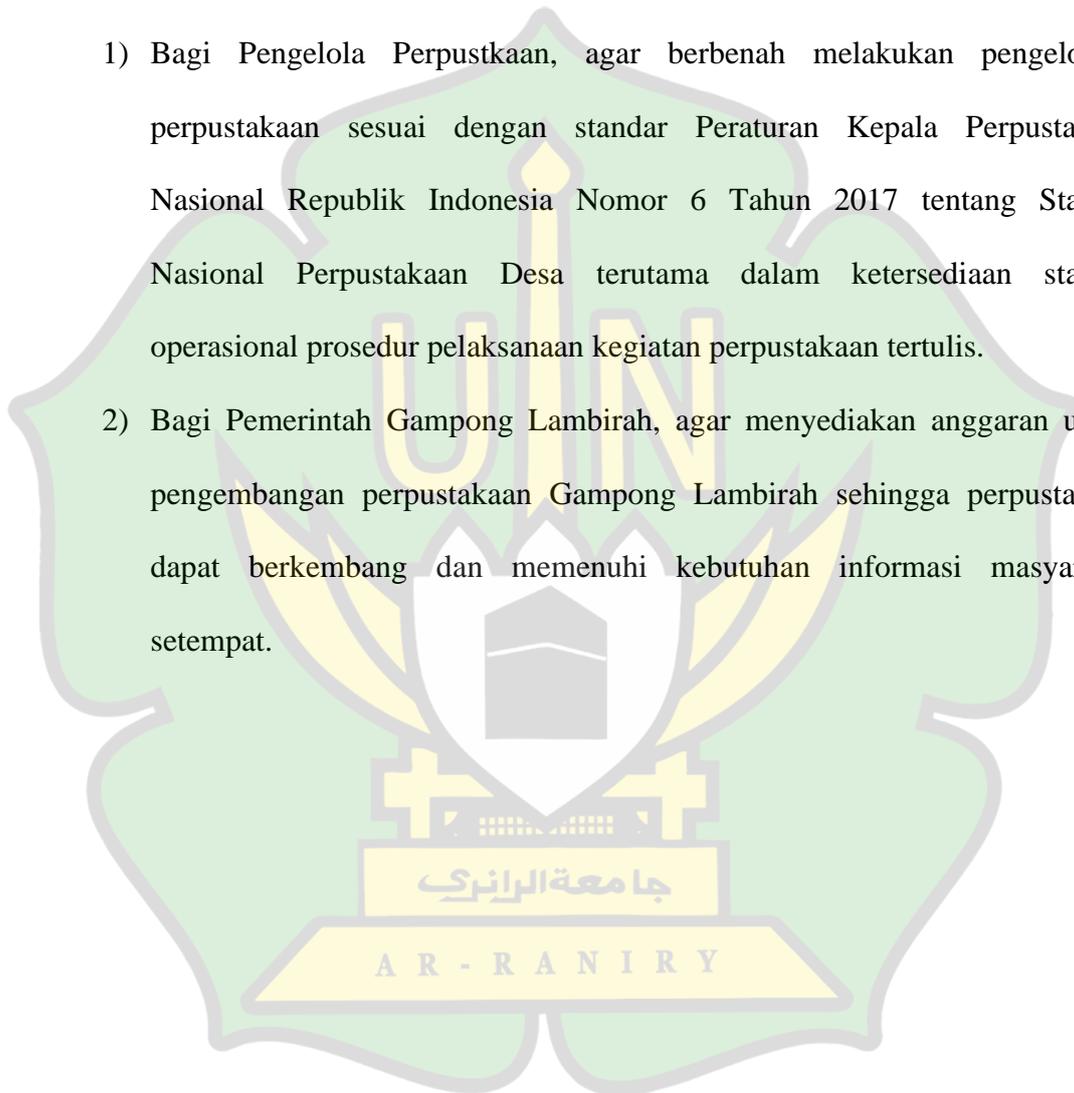
Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar menjadi wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber kebutuhan informasi bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat Gampong Lambirah, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan pengelolaan perpustakaan desa yang sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa yang telah ditetapkan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran perpustakaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pengelolaan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar yang telah sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa meliputi perencanaan, pengawasan, dan pelaporan perpustakaan sedangkan pengelolaan yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa yaitu pelaksanaan perpustakaan yang tidak memiliki prosedur yang baku dan penganggaran perpustakaan yang tidak rutin menerima anggaran desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa terdapat beberapa saran yang kiranya perlu di pertimbangkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagi Pengelola Perpustakaan, agar berbenah melakukan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa terutama dalam ketersediaan standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan perpustakaan tertulis.
- 2) Bagi Pemerintah Gampong Lambirah, agar menyediakan anggaran untuk pengembangan perpustakaan Gampong Lambirah sehingga perpustakaan dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat setempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sadikin, dkk, (2020), *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, Yogyakarta: K-Media.
- Amar Awalludin, (2017), “*Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa Ujungnegoro Kabupaten Batang*”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan* Vol 6, No 3.
- Andi Ibrahim, (2016), *Manajemen dan Administrasi Perpustakaan*, Makassar: Syahadah.
- Asnawi, (2015), "*Perpustakaan Desa Sebagai Sumber Layanan Informasi Utama*", *Media Pustakawan* Vol. 22 No. 3.
- Aurel Aulia Kurniawan, (2022), *Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Basrowi dan Suwandi, (2018), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bugin, (2011), *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djam'an Satori, (2017), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Faisal dan Sanapiah, (2008), *Formal-formal Penelitian Sosial*, Jakarta: Ratu Grafindo Persada.
- Herman, Sofiyandi, (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Johan Bhimo Sukoco, (2018), “*Administrasi Pengelolaan Perpustakaan di Desa Puro Kabupaten Sragen*”. *Journal of Public Administration and Local Governance* Vol. 2, No. 2.
- Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, (2017), *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Moh. Nazir, (2014), *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaj Rosda Karya.
- Nanang Fattah, (2015), *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka.

- Pascallino Julian Suawa, (2021), *"Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)"*, Jurnal Governance Vol. 1 No. 2.
- Pawit M. Yusuf, (2016), *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakawan*, Jakarta: Bumi Angkasa.
- Pawit M. Yusuf, Yaya Suhendar, (2005), *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Kencana.
- Poewadarminta, (2000), *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, (2020), *Manajemen Perpustakaan Desa*, Lampung: Yayasan Petualang Literasi.
- Subarini, (2014), *Transpormasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*, Jakarta: PeNA.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharismi Arikunto, (2017), *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto: Bandung.
- Suharsimi Arikunto, (1998), *Prosedur Penelitian: Suatu Pedekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarno NS. (2008), *Membina Perpustakaan Desa*. Jakarta: Sagung Seto.
- W.J.S. Poerwadarminta, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wiji Suwarno, (2011), *Perpustakaan dan Buku*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

PEDOMAN WAWANCARA

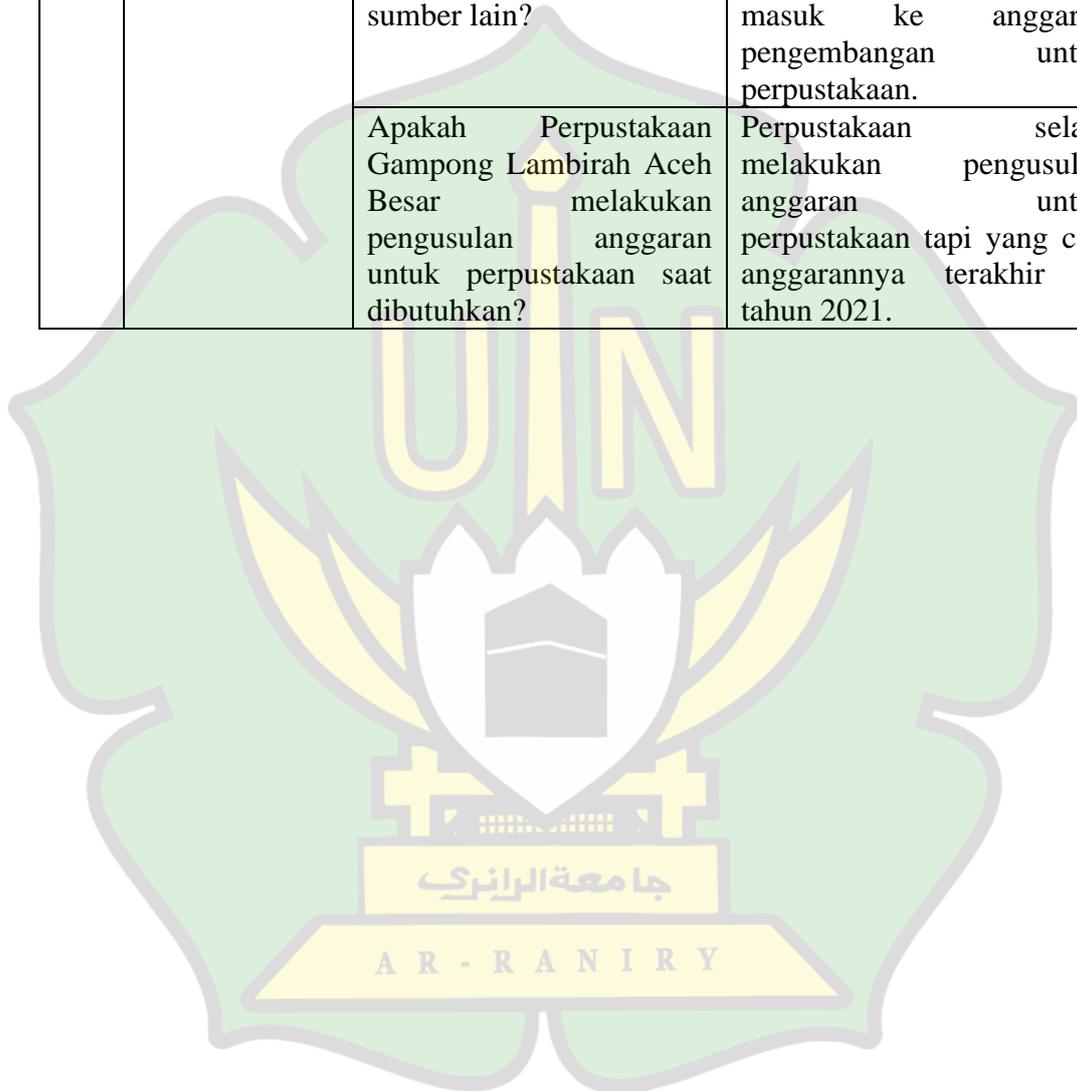
Nama:	Novayaturrahmi, S.IP
Alamat:	Lambirah, Aceh Besar
Jabatan:	Kepala Perpustakaan
Waktu Wawancara:	Selasa, 23 Mei 2023

NO.	INDIKATOR	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN
1.	Perencanaan	Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan?	Iya, saat ini perpustakaan telah menyusun baik rencana tahunan ataupun bulanan.
		Siapakah yang menyusun perencanaan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar?	Yang melakukan penyusunan perencanaan perpustakaan itu kepala perpustakaan dan pengelola perpustakaan.
		Bagaimanakah perencanaan yang dibuat oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar dalam menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan?	Perencanaan dibuat berdasarkan hasil survei kebutuhan masyarakat/pemustaka.
		Apakah perencanaan yang dilakukan dijalankan secara berkesinambungan?	Iya. Selalu dilakukan secara kesinambungan
2.	Pelaksanaan	Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar melakukan pelaksanaan perpustakaan secara mandiri (melakukan kewenangan tanpa campur tangan pihak lain) dan mempertanggung jawabkan setiap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya?	Iya benar kami udah mandiri melakukan kegiatan yang dibuat.

		Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar memiliki prosedur pelaksanaan kegiatan secara tertulis sesuai dengan ketetapan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi kegiatan inventarisasi, Pengatalogan, Penyelesaian fisik buku, dan Shelving?	Belum memiliki prosedur pelaksanaan kegiatan secara tertulis
3.	Pegawasan	Apakah pengawasan yang dilakukan terhadap Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar dilakukan secara teratur dan berkesinambungan?	Iya pengawasan dilakukan secara berkesinambungan dan teratur agar kalau ada kendala dapat segera ditangani dan tidak sampai menjadi masalah yang serius.
		Siapakah yang melakukan pengawasan terhadap Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar?	Yang melakukan pengawasan biasanya Kepala Desa, Pembina/penasehat desa.
4.	Pelaporan	Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar melakukan pelaporan kepada pemerintahan desa terkait dengan kegiatan yang sebelumnya telah dijalankan?	Kadang-kadang, tergantung kebutuhan dan ketika ada pengelola di perpustakaan
		Siapakah yang bertanggung jawab membuat pelaporan perpustakaan di Gampong Lambirah Aceh Besar kepada pemerintahan desa?	Yang melakukan pelaporan itu Kepala Perpustakaan dibantu sama bendahara
		Bagaimanakah bentuk pelaporan yang dibuat oleh penanggung jawab	Bentuknya pelaporan tertulis Laporan pertanggung jawaban atau

		perpustakaan kepada pemerintahan desa?	disebut LPJ meliputi penggunaan anggaran, Laporan kegiatan dan progres kerja perpustakaan.
		Apakah pelaporan yang dilakukan penanggung jawab Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar kepada pemerintahan desa dilakukan secara berkala?	Iya, pelaporan dibuat selalu karena memang kebutuhan untuk pengembangan perpustakaannya.
		Apakah pelaporan yang dibuat oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran?	Sesuai namun tidak dibuat rinci /detail seperti yang ada pada peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 tahun 2017 tentang standar perpustakaan Desa/Kelurahan.
5.	Penganggaran	Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan?	Untuk penganggaran selalu disusun secara kesinambungan karena merupakan kebutuhan untuk mengembangkan perpustakaan
		Siapakah yang menyusun rencana penganggaran di Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar?	Penganggaran yang bertanggung jawab disusun sama Kepala perpustakaan dibantu oleh pengelola perpustakaan
		Apakah anggaran yang telah didapatkan dimanfaatkan oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar untuk standar tiga komponen yang telah ditetapkan meliputi koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan?	Anggaran selalu kita maksimalkan di tiga poin itu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan karena itu yang paling utamanya agar perpustakaan terus bisa dilayankan kepada pemustaka.

		<p>Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar rutin menerima anggaran yang bersumber dari anggaran desa atau sumber lain?</p>	<p>Perpustakaan tidak rutin menerima anggaran dari desa, kadang ada anggaran dari desa atau dari kegiatan yang kami lakukan misalnya dari hasil sewa baju tari yang kami punya disitu juga masuk ke anggaran pengembangan untuk perpustakaan.</p>
		<p>Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar melakukan pengusulan anggaran untuk perpustakaan saat dibutuhkan?</p>	<p>Perpustakaan selalu melakukan pengusulan anggaran untuk perpustakaan tapi yang cair anggarannya terakhir di tahun 2021.</p>



Nama:	Rijalul Akbar
Alamat:	Lambirah, Aceh Besar
Jabatan:	Pengelola Perpustakaan
Waktu Wawancara:	Rabu, 24 Mei 2023

NO.	INDIKATOR	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN
1.	Perencanaan	Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan?	Rencana kerja tahunan dan bulanan pasti ada karena kegiatan yang kami buat selalu rutin jadi harus ada rencana kerja yang jelas.
		Siapakah yang menyusun perencanaan Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar?	Yang menyusun perencanaan itu Kepala perpustakaan dan pengelola perpustakaan.
		Bagaiamanakah perencanaan yang dibuat oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar dalam menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan?	Rancangan program kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemustaka
		Apakah perencanaan yang dilakukan dijalankan secara berkesinambungan?	Iya. Selalu dilakukan secara kesinambungan
2.	Pelaksanaan	Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar melakukan pelaksanaan perpustakaan secara mandiri (melakukan kewenangan tanpa campur tangan pihak lain) dan mempertanggung jawabkan setiap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya?	Untuk pelaksanaan kegiatan tetap wewenangnya dari pengelola yang bertanggung jawab atas perpustakaan sendiri.
		Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar memiliki prosedur	Untuk prosedur tertulis belum ada tapi kegiatan inventarisasi, Pengatalogan,

		pelaksanaan kegiatan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi kegiatan inventarisasi, Pengatalogan, Penyelesaian fisik buku, dan Shelving?	Penyelesaian fisik buku, dan Shelving tetap dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan
3.	Pegawasan	Apakah pengawasan yang dilakukan terhadap Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar dilakukan secara teratur dan berkesinambungan?	Iya, berkesinambungan.
		Siapakah yang melakukan pengawasan terhadap Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar?	Kepala Desa, Pembina/penasehat.
4.	Pelaporan	Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar melakukan pelaporan kepada pemerintahan desa terkait dengan kegiatan yang sebelumnya telah dijalankan?	Telah melakukan pelaporan namun sesuai dengan apa kebutuhannya kalau perlu dilaporkan ya akan dilaporkan.
		Siapakah yang bertanggung jawab membuat pelaporan perpustakaan di Gampong Lambirah Aceh Besar kepada pemerintahan desa?	Kepala Perpustakaan dan dibantu sama Bendahara
		Bagaimanakah bentuk pelaporan yang dibuat oleh penanggung jawab perpustakaan kepada pemerintahan desa?	Laporan tertulis

		Apakah pelaporan yang dilakukan penanggung jawab Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar kepada pemerintahan desa dilakukan secara berkala?	Pelaporan telah dilakukan secara berkala biar tau perpustakaan punya kendala apa dan bisa berbenah mengembangkannya.
		Apakah pelaporan yang dibuat oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran?	Pelaporan memang dibuat namun tidak dibuat secara rinci /detail seperti yang ada pada peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 tahun 2017 tentang standar perpustakaan Desa/Kelurahan.
5.	Penganggaran	Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan?	Iya ada penganggarannya sekian banyak biar jelas kebutuhan ini berapa perlu biaya yang dikeluarkan.
		Siapakah yang menyusun rencana penganggaran di Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar?	Kepala perpustakaan dibantu oleh pengelola perpustakaan
		Apakah anggaran yang telah didapatkan dimanfaatkan oleh Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar untuk standar tiga komponen yang telah ditetapkan meliputi koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan?	Iya untuk pengembangan di perpustakaan karena kalau gak maksimal kesitu perpustakaan malah tertinggal dan gak diminati masyarakat karena gak ada apa-apa.
		Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar rutin menerima anggaran yang bersumber dari anggaran desa atau sumber lain?	Tidak rutin, kalau ada dan disesuaikan dengan kebutuhan juga.

		Apakah Perpustakaan Gampong Lambirah Aceh Besar melakukan pengusulan anggaran untuk perpustakaan saat dibutuhkan?	Ada, biar pas untuk pengembangan apa yang akan dibuat.
--	--	---	--



FOTO DOKUMENTASI

